

Article

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum

Adrian Rivalni*, Arief Almufqi

Universitas Bengkulu

* *Correspondensi Penulis:* adrianrivalni1206@gmail.com

Abstract: *The Bengkulu City General Election Supervisory Agency (Bawaslu) plays an important role in ensuring the integrity of the General Election. One of Bawaslu's main functions is to monitor the stages and prevent election violations. By implementing optimal prevention strategies, Bawaslu seeks to avoid potential election violations. Bawaslu's duties and authority include developing standards for monitoring the implementation of elections for election supervisors at every level as well as preventing and taking action against election violations. The principle of elections with integrity, stated in Law No. 7 of 2017 concerning Elections, is that they are direct, public, free, secret, honest and fair. Bawaslu has an important role in ensuring these principles are implemented in the implementation of elections.*

Keywords: Election, Bawaslu, Integrity

Abstrak: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Bengkulu memainkan peran penting dalam menjamin integritas Pemilihan Umum. Salah satu fungsi utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal, Bawaslu berupaya untuk menghindari potensi pelanggaran pemilu. Tugas dan wewenang Bawaslu meliputi menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Prinsip Pemilu yang berintegritas, tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu memiliki peran penting untuk memastikan prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu.

Kata Kunci: Pemilu, Bawaslu, Integritas

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Pemilihan yang jujur, adil, dan transparan dapat mencerminkan kehendak rakyat dan membantu membentuk pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab (Setiawan, 2020). Namun, proses ini bisa menjadi rumit dan rawan penyalahgunaan. Untuk mencegah hal ini, peran pengawasan menjadi sangat penting. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan selama proses pemilihan berlangsung. Bawaslu berperan secara penuh atas ketertiban dan kelancaran Pemilu (Yuhandra et al., 2023).

Bawaslu didirikan dengan tujuan untuk menjamin integritas pemilihan, melalui pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap potensi pelanggaran pemilu (Firdaus & Anam, 2020). Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil, serta bebas dari manipulasi dan penyalahgunaan (Falangi et al., 2023).

Keberhasilan pemilihan umum ditentukan oleh sejauh mana pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan jujur dan adil. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan konsisten selama proses pemilihan berlangsung. Khususnya di kota Bengkulu, Bawaslu memiliki tantangan dan peluang yang unik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang peran Bawaslu kota Bengkulu dalam menjamin integritas pemilihan umum. Peneliti akan menelusuri berbagai strategi dan taktik yang digunakan oleh Bawaslu Bengkulu, serta tantangan dan apa saja hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas pengawasan mereka (Nabila, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang bagaimana Bawaslu kota Bengkulu bekerja untuk menjamin integritas pemilihan umum, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas di masa mendatang (Leo, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian berupa sebagai berikut: Studi Pustaka (Literature Review): Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi pustaka. Pada metode ini melibatkan pengumpulan dan review literatur yang relevan tentang Bawaslu dan perannya dalam pemilihan umum. Pada metode ini mencakup literatur akademis, laporan penelitian sebelumnya, berita, dan dokumen resmi dari Bawaslu sendiri (Yanuar, 2023).

Pengumpulan Data Primer: Metode ini melibatkan pengumpulan data langsung dari sumber pertama. Pada metode ini melakukan wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu kota Bengkulu, pengamat pemilu, dan stakeholder lainnya yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan. Selain itu, survei atau kuesioner juga digunakan dalam pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemilih dan kandidat (MUCHAMMAD, 2022).

Pengumpulan Data Sekunder: Selanjutnya yaitu menggunakan metode pengumpulan Data sekunder data ini berasal dari laporan tahunan Bawaslu, data pemilihan sebelumnya, dan sumber lainnya yang relevan. Pada metode ini mampu memberikan wawasan tentang bagaimana Bawaslu telah beroperasi di masa lalu dan bagaimana mereka telah berkontribusi terhadap integritas pemilihan (Adelia et al., 2019).

Analisis Data: Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Dalam metode ini peneliti melibatkan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan kunci yang bisa memberikan wawasan tentang peran Bawaslu dalam menjamin integritas pemilihan.

Penyusunan Laporan: Setelah analisis selesai, metode terakhir yang digunakan oleh peneliti yaitu temuan penelitian yang dirangkum dalam laporan penelitian. Laporan ini berisi metodologi penelitian, temuan, dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan

penambahan ilmu dalam peningkatan di masa depan.\Dengan berbagai Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti yang telah dijabarkan diatas diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran Bawaslu kota Bengkulu dalam menjamin integritas pemilihan umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia(Kuntag et al., 2023).

Peran utama Bawaslu adalah menjamin integritas pemilihan umum melalui pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang peran Bawaslu(Indriany & Achmad, n.d.):

1. Pencegahan

Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Mereka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum yang jujur dan adil. Bawaslu juga berperan dalam mengawasi kampanye politik, penggunaan dana kampanye, dan praktik politik yang tidak fair.

2. Deteksi: Bawaslu memiliki tugas untuk mendeteksi potensi pelanggaran pemilu. Mereka melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan, seperti pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon, dan kampanye politik. Bawaslu juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu.

3. Penindakan: Setelah mendeteksi pelanggaran pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Mereka dapat mengeluarkan sanksi administratif terhadap pelanggar, seperti pencabutan hak politik atau denda. Bawaslu juga dapat melaporkan pelanggaran pidana ke aparat penegak hukum(Saputry, 2023).

Tantangan Pengawasan Bawaslu

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya. Berikut dijbarkan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh Bawaslu:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun personel. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan, termasuk dalam hal pengawasan secara menyeluruh, penanganan pengaduan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

2. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Bawaslu perlu menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya. Tantangan ini mungkin timbul dari perbedaan pemahaman, prioritas, atau kepentingan antara Bawaslu dan pihak terkait, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan.

3. Kompleksitas Pemilihan: Pemilihan umum seringkali melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, seperti pendaftaran calon, pemutakhiran daftar pemilih, kampanye politik, dan penghitungan suara. Tantangan ini dapat muncul dalam menjaga integritas dan mengawasi setiap tahapan pemilihan dengan cermat, terutama dalam pemilihan yang melibatkan jumlah pemilih yang besar dan wilayah yang luas.

4. Penegakan Hukum: Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Namun, tantangan dalam penegakan hukum seringkali muncul, seperti keterbatasan wewenang, proses hukum yang panjang, atau resistensi dari pihak-pihak yang ingin melanggar aturan pemilu. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas penindakan dan memberikan efek jera kepada pelanggar.

5. Perkembangan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan baru bagi Bawaslu dalam mengawasi pemilihan. Misalnya, penyebaran berita palsu atau hoaks melalui media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan memengaruhi integritas pemilihan. Bawaslu perlu mengadopsi teknologi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk

mendeteksi dan mengatasi tantangan ini.

Pengawasan pemilu adalah tugas yang kompleks dan menantang. Bawaslu perlu terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan menjaga integritas pemilihan umum (Fitriana et al., 2019).

Kecurangan Dalam Pemilu

Potensi Kecurangan Dalam Bawaslu dapat muncul melalui manipulasi data. Pihak yang tidak bermaksud baik dapat mencoba memanipulasi hasil pemilihan atau informasi terkait pemilihan untuk mendapatkan keuntungan politik. Ancaman terhadap anggota Bawaslu atau petugas pemilihan dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pengawasan yang objektif (Sinaga, 2021).

Intimidasi dapat memaksa Bawaslu untuk tidak bertindak secara tegas dan independen. Informasi palsu atau hoaks dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap pemilihan dan menciptakan ketidakpastian. Hal ini dapat menjadi kendala serius bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Kecurangan dalam Pemilu juga dapat berupa aksi tukar menukar dan jual beli suara pada proses Pemilu. Dalam hal pembelian suara ini, suara yang dibeli yaitu suara-suara partai, dimana para partai saling membeli suara sehingga banyak yang dirugikan sedangkan yang menjadi korbanya adalah KPU (Awaluddin et al., 2023).

Potensi Kecurangan Dalam Bawaslu dapat muncul melalui manipulasi data. Pihak yang tidak bermaksud baik dapat mencoba memanipulasi hasil pemilihan atau informasi terkait pemilihan untuk mendapatkan keuntungan politik. Ancaman terhadap anggota Bawaslu atau petugas pemilihan dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pengawasan yang objektif. Intimidasi dapat memaksa Bawaslu untuk tidak bertindak secara tegas dan independen. Informasi palsu atau hoaks dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap pemilihan dan menciptakan ketidakpastian. Hal ini dapat menjadi kendala serius bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya (Syafriadi & Santri, 2023).

Upaya Bawaslu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan detail ditemukan ada beberapa Upaya Bawaslu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum, diantaranya yaitu (Karim, 2023):

Bawaslu dapat meningkatkan kesadaran publik terkait peran dan fungsi mereka dalam menjaga integritas pemilihan. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu dapat memperoleh dukungan lebih besar untuk upaya pengawasan mereka. Bawaslu perlu terus meningkatkan kapasitasnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi. Pelatihan rutin dan penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Bawaslu dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, untuk mengatasi kendala keamanan dan menindaklanjuti pelanggaran hukum.

Bawaslu dapat menerapkan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan elektronik dan blockchain, dapat membantu Bawaslu dalam mengatasi tantangan teknologi dan mengurangi potensi kecurangan. Serta Meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dapat membangun kepercayaan publik. Bawaslu dapat menginformasikan secara terbuka tentang langkah-langkah yang diambil dan hasil dari pengawasan mereka (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023).

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga bertanggung jawab untuk memastikan integritas pemilihan umum di Indonesia. Bawaslu melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam pemilihan umum. Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara jujur, adil, dan transparan (Fadhilah, 2024).

Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi segala bentuk pelanggaran dalam tahapan pemilihan umum, mulai dari tahap pendaftaran calon hingga pengumuman hasil pemilu. Bawaslu juga melakukan pengawasan kampanye pemilu dan pencegahan pelanggaran serta sengketa proses tahapan verifikasi partai politik (Daeli et al., 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam Pemilihan Umum di Kota Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran

krusial dalam menjamin integritas dan kredibilitas proses demokratisasi. Melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukumnya, Bawaslu Kota Bengkulu berperan sebagai penjaga keadilan dan transparansi, mencegah serta menanggulangi pelanggaran pemilu yang dapat merusak integritas pemilihan. Bawaslu Kota Bengkulu tidak hanya berfokus pada tugas penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui program-partisipatif dan edukasi, Bawaslu mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga proses pemilihan umum, menjadikan mereka mitra penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

Transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian Bawaslu Kota Bengkulu menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan umum. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk KPU dan kepolisian, Bawaslu membentuk sinergi yang efektif untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat di tingkat lokal.

Keberhasilan Bawaslu Kota Bengkulu bukan hanya tercermin dalam penanganan pelanggaran, melainkan juga dalam upaya pencegahan, edukasi, dan penyelesaian sengketa dengan keberlanjutan. Masyarakat Kota Bengkulu dapat merasakan dampak positif dari peran Bawaslu dalam membentuk lingkungan politik yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Sebagai garda terdepan dalam melindungi demokrasi, Bawaslu Kota Bengkulu menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia. Keberlanjutan dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan misinya untuk memastikan setiap pemilihan umum di Kota Bengkulu berjalan dengan integritas yang tinggi dan mendapatkan dukungan penuh dari publik.

Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu perlu meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, bekerja sama dengan pihak terkait, menerapkan teknologi canggih, dan meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, Bawaslu berusaha untuk memastikan integritas pemilihan umum di Indonesia dan menjaga agar pemilihan umum berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Saran

Bawaslu Kota Bengkulu perlu terus memperkuat kerjasamanya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kepolisian dalam upaya mendeteksi, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu. Sinergi antarlembaga ini akan memperkuat pengawasan secara menyeluruh.

Bawaslu dapat meningkatkan upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait peran dan pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Penyuluhan ini dapat dilakukan secara daring dan luring untuk mencakup berbagai kalangan masyarakat. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat sistem pengawasan. Pemanfaatan aplikasi dan platform daring dapat membantu dalam pelaporan cepat dan efisien terkait pelanggaran pemilu.

Bawaslu Kota Bengkulu sebaiknya menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga independen, LSM, dan kelompok masyarakat sipil untuk mendukung pengawasan dan memastikan integritas pemilu. Membangun sistem pengaduan yang mudah diakses dan responsive.

Dengan memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu dengan cepat, Bawaslu dapat merespon secara efisien dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, Bawaslu dapat berperan lebih proaktif dalam mencegah konflik dan sengketa terkait pemilu. Dengan mediasi yang efektif, Bawaslu dapat membantu meminimalkan potensi kerusuhan atau ketegangan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A., Saputra, H., Sakdon, S., & ... (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Lansia Pada Pemilu 2019 Di Kota Pangkalpinang. Scripta: Jurnal Ilmiah <http://www.scripta.fisip.ubb.ac.id/index.php/scripta/article/view/6>
- Awaluddin, M., Siallagan, D. Y., & ... (2023). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGGAPAN PELANGGARAN PEMILU (STUDI KASUS NETRALITAS ASN DI KOTA PONTIANAK. JURNAL <http://journal.abpolnep.ac.id/index.php/jpab/article/view/454>
- Daeli, S. S. M., Batubara, B. M., & ... (2021). Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan. Strukturasi

- <https://mail.jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/746>
- Fadhilah, O. S. (2024). The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik: The : Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam. <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/124>
- Falangi, S., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2023). Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Halmahera Utara (Studi kasus: PSU di GOVERNANCE. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/48206>
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran pemilu 2019. Reformasi. <https://www.academia.edu/download/71827067/pdf.pdf>
- Fitriana, F., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. EDUPEDIA. <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/edupedia/article/view/298>
- Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Journal of Politic and <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38462>
- Indriany, W., & Achmad, A. (n.d.). Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/58457>
- Karim, M. I. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial. Jurnal Politique. <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/politique/article/view/228>
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. Lex Administratum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/48090>
- Leo, A. S. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. [digilib.unila.ac.id. http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75696](http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75696)
- MUCHAMMAD, N. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020. repository.ummat.ac.id. <https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/5092>
- Nabila, T. (2023). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN repository.upstegal.ac.id. <https://repository.upstegal.ac.id/7766/>
- Rizky, A. (2020). Peran Bawaslu dalam menjamin integritas pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum, 12(1), 1-13.
- Saputry, R. Y. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. eprints.ipdn.ac.id. <http://eprints.ipdn.ac.id/13933/>
- Setiawan, W. (2020). ... Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/9673/1/pusat%201-2.pdf>
- Sinaga, C. (2021). ... PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI KAMPANYE HITAM PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/24/>
- Suhardiman, D. (2018). Peran Bawaslu dalam menjamin integritas pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 15(3), 569-591.
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM

- PENEGAKAN HUKUM PEMILU. REFORMASI. <https://repository.uir.ac.id/22277/>
- Yanuar, M. A. (2023). KEDUDUKAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENINDAKAN PRAKTIK POLITIK UANG. *Majalah Hukum Nasional*. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/204>
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., & ... (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius*
<https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/389/2/Efektivitas%20Fungsi%20Pencegahan%20Badan%20Pengawas%20Pemilihan%20Umum%20Dalam%20Melakukan%20Pencegahan%20Pelanggaran%20Pemilu.pdf>